

KAPITALISME KONTEMPORER DAN PROBLEM KESEJAHTERAAN:

ANALISIS ATAS RELASI PASAR, NEGARA, DAN MASYARAKAT

Membaca ulang kesejahteraan dalam hubungan antara pasar, negara, dan masyarakat

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

CIRI KAPITALISME KONTEMPORER

-  Globalisasi
-  Finansialisasi
-  Digitalisasi
-  Kapitalisme Platform
-  AI & Data
-  Konsentrasi Korporasi



PROBLEM KESEJAHTERAAN

-  Ketimpangan pendapatan & kekayaan
-  Pekerjaan rentan dan tidak stabil
-  Biaya hidup yang semakin tinggi
-  Komodifikasi layanan dasar
-  Krisis ekologis dan perubahan iklim
-  Ketidakamanan sosial dan ketidakpastian masa depan

PERAN PASAR

-  Inovasi
-  Investasi
-  Efisiensi
-  Kompetisi

RISIKO:

- Monopoli
- Asimetri Informasi
- Eksternalitas

PERAN NEGARA

-  Regulasi
-  Pajak yang adil
-  Layanan publik berkualitas
-  Perlindungan sosial
-  Kebijakan industri & inovasi
-  Koreksi kegagalan pasar

PERAN MASYARAKAT

-  Solidaritas
-  Koperasi
-  Serikat pekerja
-  Komunitas lokal
-  Masyarakat sipil
-  Etika publik

ARAH PEMBARUAN

-  Pasar yang kompetitif
-  Negara yang efektif & akuntabel
-  Masyarakat yang berdaya
-  Pekerjaan layak dan produktif
-  Perlindungan sosial universal
-  Transisi hijau yang adil
-  Tata kelola digital yang etis

RINGKASAN GLOBAL

-  **622 juta orang** masih berisiko hidup dalam kemiskinan ekstrem (proyeksi 2030)
-  **10% teratas** menguasai sekitar 3/4 kekayaan global
-  **> 3,8 miliar orang** belum terlindungi penuh oleh perlindungan sosial

PESAN UTAMA

Kesejahteraan tidak lahir otomatis dari pertumbuhan. Diperlukan pasar yang sehat, negara yang akuntabel, dan masyarakat yang solider agar ekonomi melayani martabat manusia.

Ekonomi harus menjadi sarana, bukan tujuan. Martabat manusia adalah tujuan utamanya.

Rudy C Tarumingkeng: Kapitalisme Kontemporer dan Problem Kesejahteraan: Analisis atas Relasi Pasar, Negara, dan Masyarakat

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

26 Juni 2026

KAPITALISME KONTEMPORER DAN PROBLEM KESEJAHTERAAN: ANALISIS ATAS RELASI PASAR, NEGARA, DAN MASYARAKAT

Abstrak

Kapitalisme kontemporer merupakan sistem ekonomi yang sangat produktif, inovatif, dan ekspansif, tetapi sekaligus menyimpan paradoks mendasar: kemampuannya menciptakan kekayaan tidak selalu sejalan dengan kemampuannya mendistribusikan kesejahteraan secara adil. Di satu sisi, kapitalisme modern mendorong pertumbuhan, teknologi, perdagangan global, industrialisasi, ekonomi digital, dan inovasi finansial. Di sisi lain, ia juga menghasilkan ketimpangan kekayaan, pekerjaan rentan, konsentrasi korporasi, krisis lingkungan, komodifikasi layanan dasar, dan melemahnya solidaritas sosial. Problem kesejahteraan dalam kapitalisme kontemporer tidak dapat dijelaskan hanya sebagai kegagalan individu atau kurangnya pertumbuhan, tetapi sebagai hasil dari relasi kompleks antara pasar, negara, dan masyarakat.

Data mutakhir menunjukkan bahwa kemajuan global belum otomatis menciptakan kesejahteraan universal. World Bank memperkirakan bahwa berdasarkan tren saat ini, sekitar 622 juta orang atau 7,3% penduduk dunia masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030, sementara sekitar 3,4 miliar orang atau hampir 40% penduduk dunia diperkirakan hidup dengan kurang dari US\$6,85 per hari. ([World Bank](#)) World Inequality Report

2026 menegaskan bahwa ketimpangan global tetap sangat tinggi: 10% teratas menguasai sekitar tiga perempat kekayaan global, sedangkan 50% terbawah hanya memiliki sekitar 2%. ([World Inequality Report 2026](#)) Di sisi perlindungan sosial, ILO melaporkan bahwa untuk pertama kalinya lebih dari separuh penduduk dunia telah tercakup perlindungan sosial, tetapi sekitar 3,8 miliar orang masih sama sekali tidak terlindungi dari risiko hidup dan dampak perubahan iklim. ([International Labour Organization](#))

Artikel ini berargumen bahwa problem kesejahteraan dalam kapitalisme kontemporer muncul karena ketidakseimbangan antara tiga institusi utama: **pasar**, **negara**, dan **masyarakat**. Pasar penting untuk inovasi, investasi, efisiensi, dan koordinasi ekonomi, tetapi pasar tidak otomatis menjamin keadilan, perlindungan sosial, keberlanjutan ekologis, atau martabat manusia. Negara diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar, menyediakan barang publik, membangun sistem perlindungan sosial, mengatur monopoli, melindungi pekerja, dan menjaga lingkungan. Namun negara juga dapat gagal bila ditangkap elite, korup, birokratis, atau tidak akuntabel. Masyarakat berperan sebagai ruang solidaritas, etika, budaya, partisipasi, gotong royong, serikat pekerja, koperasi, komunitas lokal, dan demokrasi sosial. Namun masyarakat dapat melemah bila seluruh relasi hidup dikomodifikasi dan diukur semata-mata dengan logika pasar.

Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa kapitalisme kontemporer membutuhkan pembaruan institusional. Kesejahteraan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pasar, tetapi juga tidak dapat dicapai oleh negara yang lemah atau masyarakat yang pasif. Diperlukan kombinasi antara pasar yang kompetitif dan produktif, negara yang efektif dan akuntabel, serta masyarakat yang berdaya dan solider. Kesejahteraan harus dipahami bukan sekadar kenaikan pendapatan, tetapi perluasan kapabilitas manusia: hidup sehat, belajar, bekerja layak, berpartisipasi, terlindungi dari risiko, dan menikmati lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: kapitalisme kontemporer, kesejahteraan, pasar, negara, masyarakat, ketimpangan, negara kesejahteraan, perlindungan sosial, kegagalan pasar, ekonomi politik, demokrasi ekonomi.

1. Pendahuluan

Kapitalisme adalah salah satu sistem ekonomi paling berpengaruh dalam sejarah modern. Ia mengubah cara manusia memproduksi, bekerja, berdagang, menabung, berinvestasi, mengonsumsi, dan membayangkan masa depan. Kapitalisme melahirkan pabrik, korporasi, pasar tenaga kerja modern, sistem perbankan, bursa saham, teknologi industri, perdagangan global, serta inovasi digital. Dalam banyak hal, kapitalisme telah memperbesar kapasitas produktif manusia secara luar biasa.

Namun kapitalisme juga selalu menyimpan problem kesejahteraan. Sejak revolusi industri, pertumbuhan kekayaan sering berjalan bersama eksploitasi buruh, kemiskinan urban, ketimpangan kelas, kolonialisme, krisis finansial, dan kerusakan lingkungan. Pada abad ke-20, banyak negara mencoba mengendalikan problem tersebut melalui negara kesejahteraan, regulasi tenaga kerja, pajak progresif, pendidikan publik, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial. Tetapi sejak akhir abad ke-20, globalisasi neoliberal, finansialisasi, privatisasi, deregulasi, dan kompetisi global kembali memperkuat peran pasar dan melemahkan sebagian mekanisme perlindungan sosial.

Kapitalisme kontemporer berbeda dari kapitalisme klasik. Ia tidak hanya berbasis pabrik dan perdagangan barang, tetapi juga berbasis data, platform digital, aset finansial, rantai pasok global, algoritma, kekayaan intelektual, merek, dan jaringan. Kekuasaan ekonomi tidak hanya berada pada pemilik pabrik, tetapi juga pada pemilik data, platform, modal

ventura, cloud computing, sistem pembayaran, dan jaringan logistik global. Kapitalisme hari ini lebih cepat, lebih terdigitalisasi, lebih terhubung, tetapi juga lebih rentan terhadap konsentrasi kekayaan.

Pertanyaan pokok artikel ini adalah: **mengapa kapitalisme yang sangat produktif masih gagal menjamin kesejahteraan bagi semua?**

Pertanyaan ini penting karena banyak negara, termasuk negara berkembang, sering menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Pertumbuhan memang penting, tetapi pertumbuhan tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Kesejahteraan membutuhkan distribusi, perlindungan, akses, kualitas pekerjaan, layanan publik, lingkungan sehat, dan keadilan institusional.

Kapitalisme kontemporer perlu dibaca melalui relasi antara **pasar, negara, dan masyarakat**. Pasar menciptakan insentif, efisiensi, inovasi, dan akumulasi modal. Negara menyediakan hukum, regulasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, dan koreksi terhadap kegagalan pasar. Masyarakat membangun solidaritas, norma, etika, kepercayaan, organisasi kolektif, dan partisipasi demokratis. Bila salah satu unsur ini mendominasi secara berlebihan, keseimbangan sosial terganggu. Pasar tanpa negara dan masyarakat dapat menjadi liar dan eksploitatif. Negara tanpa pasar dan masyarakat dapat menjadi otoriter atau birokratis. Masyarakat tanpa institusi ekonomi dan negara yang memadai dapat menjadi rentan dan tidak berdaya.

2. Kapitalisme Kontemporer: Ciri dan Perubahannya

Kapitalisme kontemporer memiliki beberapa ciri utama.

Pertama, **globalisasi produksi**. Barang tidak lagi diproduksi sepenuhnya di satu negara. Rantai pasok global membagi produksi ke berbagai lokasi: desain di satu negara, bahan baku dari negara lain, perakitan di negara ketiga, pemasaran global melalui platform digital, dan pembiayaan melalui

pasar modal internasional. Struktur ini menciptakan efisiensi, tetapi juga membuat pekerja dan negara bersaing dalam rantai nilai yang tidak setara.

Kedua, **finansialisasi**. Keuangan semakin dominan dalam ekonomi. Perusahaan tidak hanya mencari laba dari produksi barang dan jasa, tetapi juga dari instrumen finansial, saham, obligasi, derivatif, real estate, private equity, dan aset digital. Keuntungan finansial sering tumbuh lebih cepat daripada upah. Ini memperkuat posisi pemilik aset.

Ketiga, **kapitalisme platform**. Perusahaan digital menguasai infrastruktur interaksi ekonomi: pencarian, belanja, transportasi daring, pembayaran, iklan, media sosial, layanan cloud, dan distribusi konten. Platform tidak hanya menjadi pelaku pasar; ia menjadi pengatur pasar. Ia menentukan algoritma, visibilitas, harga, reputasi, data, dan akses.

Keempat, **ekonomi data dan AI**. Data menjadi aset strategis. Siapa yang menguasai data dan komputasi dapat menguasai prediksi, personalisasi, otomasi, dan pengambilan keputusan. AI memperbesar produktivitas, tetapi juga memperbesar ketimpangan antara perusahaan besar dan kecil, pekerja terampil dan pekerja rutin, serta negara maju dan negara berkembang.

Kelima, **konsentrasi kekayaan dan kekuatan pasar**. Dalam banyak sektor, perusahaan besar semakin dominan. Konsentrasi ini dapat menghasilkan efisiensi skala, tetapi juga dapat menghambat persaingan, menekan upah, menguasai data, dan memengaruhi kebijakan publik.

Keenam, **krisis ekologis**. Kapitalisme kontemporer beroperasi dalam batas planet yang semakin tertekan: perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, polusi plastik, degradasi tanah, krisis air, dan kerusakan laut. Sistem produksi dan konsumsi global menghasilkan kemakmuran bagi sebagian, tetapi biaya ekologisnya sering ditanggung kelompok rentan.

Ketujuh, **ketidakamanan kerja**. Pekerjaan formal stabil tidak lagi menjadi pengalaman universal. Banyak pekerja masuk ekonomi informal, kontrak pendek, gig economy, outsourcing, pekerjaan paruh waktu, atau pekerjaan

tanpa perlindungan sosial yang memadai. Fleksibilitas pasar sering berarti ketidakpastian hidup bagi pekerja.

Dengan ciri-ciri tersebut, kapitalisme kontemporer bukan sekadar sistem ekonomi, tetapi struktur sosial-politik yang membentuk cara manusia hidup, bekerja, berhubungan, dan membayangkan kesejahteraan.

3. Problem Kesejahteraan: Mengapa Pertumbuhan Tidak Cukup

Kesejahteraan sering disederhanakan menjadi pendapatan. Jika pendapatan meningkat, masyarakat dianggap lebih sejahtera. Namun pendapatan hanyalah salah satu dimensi. Kesejahteraan mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, perumahan, keamanan sosial, lingkungan, relasi sosial, martabat, kebebasan, dan kemampuan berpartisipasi.

Pertumbuhan ekonomi dapat menaikkan PDB, tetapi tidak selalu meningkatkan semua dimensi tersebut. Sebuah negara dapat tumbuh karena ekspor komoditas, tetapi masyarakat lokal kehilangan hutan, tanah, atau air. Perusahaan dapat meningkatkan laba melalui efisiensi, tetapi pekerja kehilangan pekerjaan. Harga saham dapat naik, tetapi upah stagnan. PDB dapat bertambah, tetapi ketimpangan dan stres sosial meningkat. Kota dapat berkembang, tetapi perumahan menjadi tidak terjangkau.

Problem kesejahteraan dalam kapitalisme muncul karena hasil pasar sangat dipengaruhi oleh kepemilikan aset. Orang yang memiliki tanah, saham, properti, bisnis, atau data memperoleh pendapatan dari aset. Orang yang tidak memiliki aset hanya menjual tenaga kerja. Jika return atas modal lebih cepat daripada pertumbuhan upah, maka ketimpangan melebar. Piketty menyebut dinamika ini sebagai ketegangan antara modal dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pasar tidak menjamin akses universal terhadap layanan dasar. Pendidikan dan kesehatan bisa menjadi komoditas mahal. Jika keluarga miskin tidak mampu membayar pendidikan berkualitas, anak-anak mereka memasuki pasar kerja dengan modal manusia yang lemah. Jika layanan kesehatan mahal, sakit dapat menjadi jalan menuju kemiskinan. Jika perumahan diserahkan sepenuhnya pada spekulasi pasar, pekerja dapat terusir dari kota tempat mereka bekerja.

Problem kesejahteraan juga muncul karena kapitalisme cenderung mengukur nilai berdasarkan kemampuan membayar. Namun banyak hal penting dalam hidup tidak bisa sepenuhnya diukur dengan harga: kasih sayang, perawatan, solidaritas, identitas budaya, lingkungan hidup, dan martabat manusia. Bila seluruh kehidupan dikomodifikasi, masyarakat dapat kehilangan fondasi sosialnya.

4. Ketimpangan sebagai Ciri Struktural Kapitalisme Kontemporer

Ketimpangan bukan sekadar efek samping. Dalam kapitalisme kontemporer, ketimpangan dapat menjadi ciri struktural karena sistem ini memberi imbalan besar kepada kepemilikan modal, teknologi, data, dan posisi pasar. Mereka yang memiliki aset produktif memperoleh keuntungan dari akumulasi. Mereka yang tidak memiliki aset harus bergantung pada upah.

Data global memperlihatkan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. World Inequality Report 2026 menyatakan bahwa 10% teratas menguasai sekitar tiga perempat kekayaan global, sementara 50% terbawah hanya memiliki sekitar 2%. ([World Inequality Report 2026](#)) Angka ini menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan tidak dapat dijawab hanya dengan meningkatkan produksi global. Dunia sudah cukup produktif untuk menghasilkan kekayaan besar, tetapi distribusi kekayaannya sangat timpang.

Ketimpangan kekayaan lebih sulit diatasi daripada ketimpangan pendapatan karena kekayaan dapat diwariskan. Anak dari keluarga kaya memperoleh rumah, pendidikan baik, jaringan sosial, modal usaha, dan keamanan finansial. Anak dari keluarga miskin memulai hidup dengan risiko lebih besar: gizi kurang, sekolah lemah, akses digital terbatas, lingkungan rentan, dan sedikit aset. Pasar kemudian tampak "netral", tetapi sebenarnya peserta pasar masuk dari titik awal yang sangat berbeda.

Ketimpangan juga diperkuat oleh finansialisasi. Ketika harga saham, properti, dan aset finansial naik, pemilik aset menjadi semakin kaya. Pekerja yang tidak memiliki aset tidak ikut menikmati kenaikan tersebut. Jika upah tumbuh lambat, maka kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja melebar.

Dalam ekonomi digital, ketimpangan diperkuat oleh data dan efek jaringan. Perusahaan platform besar dapat mengumpulkan data dari miliaran pengguna, memperbaiki algoritma, menarik pengiklan, dan menguasai pasar. UMKM dan pekerja kecil masuk ke platform, tetapi nilai terbesar sering terkonsentrasi pada pemilik platform. Ini menciptakan bentuk baru kapitalisme: kapitalisme data.

5. Pasar: Mesin Produktivitas dan Sumber Kegagalan Sosial

Pasar memiliki peran penting dalam kapitalisme. Ia menghubungkan pembeli dan penjual, memberi sinyal harga, mendorong efisiensi, menyediakan insentif inovasi, dan memungkinkan spesialisasi. Tanpa pasar, ekonomi modern sulit berjalan. Namun pasar bukan institusi yang sempurna.

Pasar gagal ketika harga tidak mencerminkan biaya sosial. Polusi udara, emisi karbon, kerusakan hutan, dan pencemaran air sering tidak masuk dalam harga barang. Akibatnya, barang tampak murah, tetapi masyarakat menanggung biaya kesehatan dan lingkungan. Ini disebut eksternalitas.

Pasar juga gagal menyediakan barang publik secara memadai. Pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, riset ilmiah, infrastruktur, keamanan, data publik, udara bersih, dan stabilitas iklim memiliki manfaat luas, tetapi pasar tidak selalu menyediakannya karena keuntungan privatnya terbatas. Tanpa negara, barang publik sering kurang tersedia.

Pasar gagal ketika informasi tidak seimbang. Dalam pasar kredit, bank tidak selalu mengetahui kualitas peminjam, sehingga orang miskin tanpa agunan sulit memperoleh modal. Dalam pasar kesehatan, pasien sulit menilai kualitas layanan. Dalam pasar digital, pengguna tidak tahu bagaimana data mereka dipakai. Asimetri informasi menciptakan eksploitasi dan ketidakadilan.

Pasar juga gagal ketika kekuatan pasar terkonsentrasi. Monopoli atau oligopoli dapat menaikkan harga, menekan pemasok, menghambat pesaing, dan menekan upah. OECD mencatat bahwa di banyak negara OECD, rasio pendapatan rata-rata 10% terkaya terhadap 10% termiskin mencapai 8,4 banding 1 pada 2021. ([OECD](#)) Ketimpangan pendapatan seperti ini tidak hanya berasal dari perbedaan keterampilan, tetapi juga dari struktur pasar, bargaining power, dan institusi.

Dengan demikian, pasar adalah mesin produktivitas, tetapi bukan penjamin kesejahteraan. Pasar perlu dikoreksi, diarahkan, dan dibatasi oleh institusi publik serta norma sosial.

6. Negara: Korektor, Penjamin, dan Pengarah

Negara hadir karena pasar tidak cukup. Negara menyediakan hukum, keamanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan regulasi. Negara juga mengelola konflik distribusi: siapa membayar pajak, siapa menerima subsidi, siapa mendapat perlindungan, dan siapa menanggung biaya transisi.

Dalam kapitalisme modern, negara memiliki beberapa fungsi kesejahteraan.

Pertama, **fungsi korektif**. Negara mengoreksi kegagalan pasar melalui regulasi lingkungan, perlindungan konsumen, antimonopoli, standar tenaga kerja, dan pajak eksternalitas.

Kedua, **fungsi redistributif**. Negara memungut pajak dan mendistribusikannya melalui pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, pensiun, jaminan pengangguran, dan layanan publik.

Ketiga, **fungsi produktif**. Negara membangun infrastruktur, riset, pendidikan vokasi, kebijakan industri, dan ekosistem inovasi. Negara bukan hanya “penjaga malam”, tetapi dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi.

Keempat, **fungsi stabilisasi**. Negara dan bank sentral menjaga stabilitas makro, inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan. Tanpa stabilitas, kelompok miskin biasanya paling terdampak.

Kelima, **fungsi perlindungan sosial**. Negara melindungi warga dari risiko hidup: sakit, usia tua, pengangguran, disabilitas, bencana, dan kemiskinan.

Namun negara juga dapat gagal. Negara dapat ditangkap elite ekonomi, sehingga regulasi melindungi kepentingan korporasi besar. Negara dapat korup, sehingga anggaran publik bocor. Negara dapat birokratis, sehingga layanan lambat dan tidak responsif. Negara dapat otoriter, sehingga rakyat kehilangan suara. Negara dapat populis, sehingga kebijakan jangka pendek mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Karena itu, problem kesejahteraan tidak cukup dijawab dengan “lebih banyak negara” atau “lebih banyak pasar”. Yang diperlukan adalah **negara efektif**: mampu, bersih, akuntabel, demokratis, dan berpihak pada nilai publik.

7. Masyarakat: Solidaritas, Partisipasi, dan Batas Moral Pasar

Masyarakat adalah unsur yang sering dilupakan dalam debat kapitalisme. Banyak perdebatan hanya mempertentangkan negara dan pasar. Padahal, kesejahteraan juga sangat bergantung pada masyarakat: keluarga, komunitas, serikat pekerja, koperasi, organisasi sosial, lembaga keagamaan, gerakan lingkungan, masyarakat adat, akademisi, media, dan warga aktif.

Masyarakat menyediakan solidaritas yang tidak dapat digantikan pasar. Ketika seseorang sakit, keluarga dan komunitas sering menjadi pelindung pertama. Ketika terjadi bencana, gotong royong menjadi mekanisme pemulihan. Ketika pekerja menghadapi eksploitasi, serikat pekerja dapat memperkuat posisi tawar. Ketika petani kecil menghadapi pasar yang tidak adil, koperasi dapat menjadi alat agregasi. Ketika lingkungan rusak, masyarakat sipil dapat menjadi pengawas.

Masyarakat juga memberi batas moral bagi pasar. Tidak semua hal boleh dijual dan dibeli. Martabat manusia, suara politik, hak dasar, tubuh manusia, alam sakral, dan kepercayaan sosial tidak boleh sepenuhnya tunduk pada harga. Karl Polanyi mengingatkan bahwa bila tanah, tenaga kerja, dan uang diperlakukan semata-mata sebagai komoditas, masyarakat akan mengalami dislokasi sosial.

Dalam konteks Indonesia, masyarakat memiliki modal sosial seperti gotong royong, koperasi, mapalus, sasi, subak, musyawarah, dan berbagai bentuk kearifan lokal. Modal sosial ini dapat menjadi fondasi ekonomi yang lebih manusiawi. Namun modal sosial dapat melemah bila kompetisi pasar dan individualisme ekstrem masuk tanpa keseimbangan.

Masyarakat tidak boleh hanya menjadi korban kapitalisme atau penerima bantuan negara. Masyarakat harus menjadi pelaku: mengorganisasi diri, mengawasi negara, membangun koperasi, memperkuat ekonomi lokal, dan memperjuangkan keadilan sosial.

8. Negara Kesejahteraan: Upaya Menjinakkan Kapitalisme

Negara kesejahteraan atau *welfare state* lahir sebagai respons terhadap problem kapitalisme industri. Di Eropa Barat setelah Perang Dunia II, negara kesejahteraan berkembang melalui jaminan kesehatan, pendidikan publik, pensiun, asuransi pengangguran, perumahan sosial, dan regulasi tenaga kerja. Tujuannya bukan menghapus pasar, tetapi menjinakkan dampak sosial pasar.

Esping-Andersen membedakan beberapa rezim negara kesejahteraan: liberal, konservatif-korporatis, dan sosial-demokratik. Rezim liberal memberi peran besar kepada pasar dan bantuan minimum bagi kelompok miskin. Rezim konservatif menghubungkan perlindungan sosial dengan keluarga dan pekerjaan formal. Rezim sosial-demokratik menekankan universalitas layanan dan dekomodifikasi kehidupan dasar.

Kapitalisme kontemporer menantang negara kesejahteraan. Globalisasi membuat modal mudah bergerak, sehingga negara takut menaikkan pajak. Populasi menua meningkatkan biaya pensiun dan kesehatan. Ekonomi gig membuat banyak pekerja tidak masuk sistem perlindungan sosial formal. Migrasi, perubahan teknologi, dan krisis iklim menambah beban sosial. Keuangan publik menghadapi tekanan utang.

Namun kebutuhan negara kesejahteraan justru meningkat. ILO melaporkan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia kini tercakup perlindungan sosial, tetapi 3,8 miliar orang masih tidak terlindungi sama sekali.

([International Labour Organization](#)) Ini menunjukkan bahwa perluasan perlindungan sosial adalah agenda global yang belum selesai. Kapitalisme kontemporer menciptakan risiko baru; tanpa perlindungan sosial, risiko itu jatuh kepada individu dan keluarga.

Negara kesejahteraan masa depan harus lebih adaptif: mencakup pekerja informal, pekerja gig, pekerja migran, perempuan, lansia, difabel, dan masyarakat terdampak iklim. Perlindungan sosial tidak boleh hanya berbasis status pekerjaan formal, karena dunia kerja semakin fleksibel.

9. Finansialisasi dan Krisis Kesejahteraan

Salah satu ciri kapitalisme kontemporer adalah finansialisasi. Keuangan menjadi semakin dominan dalam ekonomi. Sektor keuangan seharusnya mendukung produksi melalui tabungan, kredit, investasi, dan manajemen risiko. Namun ketika keuangan menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, ekonomi dapat bergeser dari penciptaan nilai riil menuju ekstraksi nilai.

Finansialisasi memengaruhi kesejahteraan melalui beberapa jalur.

Pertama, **prioritas pemegang saham**. Perusahaan sering menempatkan harga saham, dividen, dan buyback di atas investasi jangka panjang, pelatihan pekerja, atau kenaikan upah. Ini dapat memperbesar laba modal tetapi melemahkan kesejahteraan pekerja.

Kedua, **kenaikan harga aset**. Properti dan saham menjadi instrumen akumulasi kekayaan. Pemilik aset menjadi lebih kaya, sementara generasi muda dan pekerja tanpa aset kesulitan membeli rumah atau membangun kekayaan.

Ketiga, **utang rumah tangga**. Ketika upah stagnan dan biaya hidup naik, rumah tangga bergantung pada utang. Pendidikan, kesehatan, rumah, dan konsumsi dibiayai kredit. Sektor keuangan memperoleh bunga, tetapi keluarga menjadi rentan.

Keempat, **krisis finansial**. Kapitalisme finansial rentan terhadap gelembung aset. Ketika krisis terjadi, negara sering menyelamatkan sistem keuangan demi stabilitas, tetapi rakyat menanggung pengangguran, pemotongan anggaran, dan austeritas.

Finansialisasi menunjukkan bahwa kapitalisme kontemporer tidak selalu mengarahkan modal ke sektor produktif. Modal dapat berputar dalam aset finansial dan menghasilkan kekayaan bagi pemilik aset tanpa menciptakan kesejahteraan luas.

10. Kapitalisme Digital: Produktivitas, Data, dan Ketimpangan Baru

Kapitalisme digital membawa janji besar: efisiensi, akses informasi, inovasi, layanan murah, dan peluang kewirausahaan. UMKM dapat menjual produk secara daring. Konsumen mendapat pilihan luas. Pekerja dapat memperoleh pekerjaan melalui platform. Pendidikan dapat diakses jarak jauh. AI dapat membantu produktivitas.

Namun kapitalisme digital juga menciptakan ketimpangan baru. Data pengguna menjadi sumber nilai, tetapi pengguna sering tidak memperoleh bagian yang adil. Platform menentukan algoritma yang mengatur visibilitas, harga, reputasi, dan akses pasar. Pekerja gig tampak mandiri, tetapi sering dikendalikan oleh aplikasi. UMKM tampak mendapat pasar baru, tetapi bergantung pada platform besar dan iklan berbayar.

AI memperkuat dinamika ini. Perusahaan besar memiliki data, talenta, cloud, dan komputasi. Mereka dapat mengembangkan model yang semakin kuat. UMKM dan pekerja kecil menjadi pengguna, bukan pemilik teknologi. Jika tidak diatur, AI dapat memperdalam ketimpangan antara pemilik infrastruktur digital dan pengguna biasa.

Kapitalisme digital juga menimbulkan problem demokrasi: disinformasi, deepfake, manipulasi opini, surveillance capitalism, dan polarisasi. Kesejahteraan tidak hanya terganggu oleh kemiskinan material, tetapi juga oleh kerusakan ruang publik dan hilangnya kepercayaan sosial.

Karena itu, regulasi digital menjadi bagian dari agenda kesejahteraan. Perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, persaingan platform, hak pekerja gig, pajak digital, dan akses publik terhadap teknologi harus menjadi perhatian negara.

11. Krisis Ekologis: Batas Alam bagi Kapitalisme

Kapitalisme kontemporer menghadapi batas ekologis. Sistem produksi dan konsumsi global menggunakan energi, air, tanah, mineral, hutan, dan laut

dalam skala besar. Selama biaya ekologis tidak masuk dalam harga, pasar akan terus mendorong eksploitasi.

Perubahan iklim adalah contoh kegagalan pasar global terbesar. Emisi karbon menghasilkan keuntungan privat, tetapi biayanya ditanggung seluruh dunia, terutama kelompok miskin dan generasi mendatang. Kehilangan biodiversitas juga demikian. Hutan ditebang untuk keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi masyarakat kehilangan air, tanah, pangan, dan stabilitas iklim.

Problem ekologis memperlihatkan kelemahan kapitalisme yang hanya mengejar pertumbuhan kuantitatif. Bila pertumbuhan diukur hanya dengan PDB, maka kegiatan yang merusak alam dapat tampak sebagai kemajuan. Menebang hutan, menambang, membangun, dan mengobati penyakit akibat polusi semuanya dapat menambah PDB. Tetapi PDB tidak selalu mencatat hilangnya ekosistem, budaya, kesehatan, dan masa depan.

Kesejahteraan harus memasukkan keberlanjutan ekologis. Masyarakat tidak sejahtera jika pendapatannya naik tetapi airnya tercemar, udaranya buruk, pangannya terancam, dan tempat tinggalnya rentan banjir. Transisi hijau harus menjadi bagian dari pembaruan kapitalisme.

Namun transisi hijau juga harus adil. Jika biaya transisi dibebankan kepada pekerja miskin, petani kecil, nelayan, atau negara berkembang, maka kebijakan hijau dapat menjadi bentuk ketidakadilan baru. Transisi energi harus disertai perlindungan sosial, pelatihan ulang, diversifikasi ekonomi daerah, dan pembiayaan iklim yang adil.

12. Kesejahteraan sebagai Kapabilitas

Amartya Sen menawarkan cara pandang penting: kesejahteraan bukan hanya kepemilikan barang atau pendapatan, tetapi **kapabilitas**—kemampuan nyata manusia untuk menjalani hidup yang bernilai. Orang

sejahtera bukan hanya karena memiliki uang, tetapi karena ia mampu hidup sehat, belajar, bekerja, bergerak, berpartisipasi, dan dihormati.

Pendekatan kapabilitas membantu mengkritik kapitalisme kontemporer. Pasar dapat memberi barang, tetapi tidak otomatis memberi kemampuan. Seseorang mungkin memiliki pendapatan, tetapi jika tidak ada rumah sakit, ia tetap rentan. Seseorang mungkin punya pekerjaan, tetapi jika pekerjaannya berbahaya dan tidak bermartabat, kesejahteraannya rendah. Seseorang mungkin punya akses internet, tetapi jika tidak memiliki literasi, ia tetap tertinggal.

Kapabilitas juga menekankan kebebasan substantif. Kebebasan bukan hanya bebas membeli, tetapi bebas dari kelaparan, bebas dari penyakit yang dapat dicegah, bebas dari buta huruf, bebas dari ketakutan, bebas dari diskriminasi, dan bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, problem kesejahteraan dalam kapitalisme bukan hanya distribusi uang, tetapi distribusi kapabilitas. Negara, pasar, dan masyarakat harus dinilai dari kontribusinya terhadap kapabilitas manusia.

13. Relasi Pasar, Negara, dan Masyarakat: Tiga Model Ekonomi Politik

Untuk memahami kapitalisme kontemporer, kita dapat membedakan tiga model relasi pasar-negara-masyarakat.

13.1 Model Pasar-Dominan

Dalam model ini, pasar dianggap sebagai mekanisme utama penyelesaian masalah sosial. Negara berperan minimal, regulasi dikurangi, privatisasi diperluas, dan kesejahteraan dipahami sebagai tanggung jawab individu. Model ini dapat mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi rentan memperbesar ketimpangan dan melemahkan perlindungan sosial.

13.2 Model Negara-Dominan

Dalam model ini, negara mengendalikan sektor strategis, mengarahkan investasi, mengatur harga, dan menyediakan banyak layanan. Model ini dapat mempercepat pembangunan jika negara efektif, tetapi berisiko menciptakan birokrasi besar, rente, korupsi, dan pembatasan kebebasan jika akuntabilitas lemah.

13.3 Model Keseimbangan Sosial-Demokratis

Dalam model ini, pasar tetap bekerja, tetapi dibatasi dan dikoreksi oleh negara serta diperkuat oleh masyarakat. Negara menyediakan layanan publik dan perlindungan sosial, pasar mendorong inovasi dan produktivitas, masyarakat membangun solidaritas dan pengawasan demokratis. Model ini tidak sempurna, tetapi menawarkan jalan tengah yang lebih manusiawi.

Kapitalisme kontemporer membutuhkan model ketiga: pasar produktif, negara efektif, dan masyarakat berdaya.

14. Kapitalisme dan Kelas Menengah

Kelas menengah sering dianggap sebagai penopang kapitalisme demokratis. Mereka memiliki daya beli, pendidikan, aspirasi mobilitas, dan kepentingan pada stabilitas. Namun kapitalisme kontemporer juga menekan kelas menengah.

Biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan pensiun meningkat. Pekerjaan formal stabil tidak selalu tersedia. Otomasi dan AI mengancam pekerjaan kognitif rutin. Utang rumah tangga meningkat. Generasi muda sulit membeli rumah. Ketidakpastian ini membuat kelas menengah merasa rentan.

Kelas menengah rentan penting karena mereka berada di antara harapan dan ketakutan. Mereka tidak miskin secara statistik, tetapi tidak cukup aman. Bila mereka kehilangan pekerjaan, sakit, atau menghadapi kenaikan biaya hidup, mereka dapat turun kelas. Kegelisahan kelas menengah dapat

memengaruhi politik: tuntutan populis, polarisasi, atau ketidakpercayaan pada institusi.

Negara kesejahteraan modern harus melindungi bukan hanya orang miskin ekstrem, tetapi juga kelas pekerja dan kelas menengah rentan.

Perlindungan sosial universal, kesehatan publik, pendidikan berkualitas, transportasi publik, dan perumahan terjangkau menjadi penting untuk menjaga stabilitas sosial.

15. Pekerjaan Layak sebagai Fondasi Kesejahteraan

Kapitalisme menciptakan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan layak. Pekerjaan layak mencakup upah memadai, keselamatan, jam kerja manusiawi, jaminan sosial, kesempatan berkembang, dan martabat. Tanpa pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi tidak terasa sebagai kesejahteraan.

Masalah besar kapitalisme kontemporer adalah pemisahan antara produktivitas dan keamanan kerja. Perusahaan mencari fleksibilitas, sementara pekerja membutuhkan kepastian. Outsourcing, kontrak jangka pendek, gig economy, dan informalitas memberi fleksibilitas bagi perusahaan, tetapi memindahkan risiko kepada pekerja.

Pekerjaan layak membutuhkan regulasi tenaga kerja yang seimbang. Regulasi terlalu kaku dapat menghambat penciptaan kerja, tetapi regulasi terlalu lemah menghasilkan eksploitasi. Negara perlu memastikan standar minimum: upah layak, keselamatan kerja, jaminan sosial, hak berorganisasi, dan perlindungan pekerja rentan.

Di era AI, pekerjaan layak juga berarti hak atas pelatihan ulang. Jika teknologi mengubah pekerjaan, pekerja tidak boleh dibiarkan menanggung transisi sendirian. Perusahaan dan negara harus berinvestasi dalam reskilling dan upskilling.

16. Koperasi dan Ekonomi Solidaritas

Salah satu jalan memperbaiki kapitalisme adalah memperkuat ekonomi solidaritas: koperasi, usaha sosial, komunitas produksi, BUMDes, keuangan mikro berbasis komunitas, dan organisasi ekonomi rakyat. Koperasi dapat menjadi jembatan antara pasar dan masyarakat. Ia tetap beroperasi secara ekonomi, tetapi kepemilikan dan manfaatnya lebih kolektif.

Koperasi penting terutama bagi petani, nelayan, pekerja informal, UMKM, dan komunitas lokal. Melalui koperasi, pelaku kecil dapat menggabungkan skala, memperoleh pembiayaan, membeli input lebih murah, menjual produk dengan daya tawar lebih kuat, dan mengakses teknologi.

Namun koperasi tidak boleh romantis. Koperasi membutuhkan manajemen profesional, akuntabilitas, teknologi, transparansi, dan jaringan pasar. Koperasi yang buruk dapat menjadi birokratis atau dikuasai elite lokal. Tetapi koperasi yang baik dapat memperluas demokrasi ekonomi.

Kapitalisme kontemporer membutuhkan bentuk kepemilikan yang lebih beragam. Tidak semua ekonomi harus dikuasai korporasi besar. Koperasi dan usaha sosial dapat menjadi instrumen kesejahteraan yang lebih berakar pada masyarakat.

17. Pajak, Redistribusi, dan Keadilan Fiskal

Kesejahteraan publik membutuhkan pembiayaan. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transportasi publik, riset, perumahan, dan transisi hijau tidak dapat berjalan tanpa pendapatan negara. Karena itu, pajak adalah instrumen moral dan politik, bukan hanya teknis.

Dalam kapitalisme kontemporer, pajak menghadapi tantangan besar. Modal mudah bergerak lintas negara. Perusahaan multinasional dapat mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Orang kaya dapat menggunakan instrumen hukum untuk mengurangi pajak. Ekonomi digital sulit dikenai pajak secara adil. Jika sistem pajak lemah, negara tidak mampu membiayai kesejahteraan.

Pajak progresif diperlukan untuk mengurangi ketimpangan dan membiayai kapabilitas publik. Namun pajak hanya akan diterima jika negara dipercaya. Warga bersedia membayar pajak bila melihat layanan publik baik, korupsi rendah, dan beban pajak dibagi adil.

Keadilan fiskal juga berarti belanja berkualitas. Pajak progresif tidak berguna jika anggaran bocor atau digunakan untuk proyek tidak produktif. Redistribusi harus mengubah hidup nyata: sekolah lebih baik, puskesmas lebih kuat, transportasi lebih murah, pekerja lebih terlindungi, dan lingkungan lebih sehat.

18. Problem Demokrasi dalam Kapitalisme Kontemporer

Kapitalisme dan demokrasi memiliki hubungan ambivalen. Di satu sisi, pasar bebas dapat mendukung kebebasan individu, pluralisme ekonomi, dan kelas menengah. Di sisi lain, konsentrasi kekayaan dapat merusak kesetaraan politik. Demokrasi menyatakan satu orang satu suara, tetapi kapitalisme dapat menghasilkan satu rupiah satu pengaruh.

Ketika kekayaan terkonsentrasi, elite ekonomi dapat memengaruhi kebijakan melalui lobi, pendanaan politik, media, think tank, iklan, dan jaringan kekuasaan. Kebijakan pajak, upah, lingkungan, perizinan, dan regulasi pasar dapat lebih responsif kepada kelompok kuat daripada rakyat biasa.

Problem ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Warga perlu memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi. Serikat pekerja, koperasi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media independen, dan partisipasi publik adalah bagian dari sistem kesejahteraan. Tanpa demokrasi, kebijakan ekonomi mudah ditangkap oleh elite.

Demokrasi ekonomi berarti memperluas partisipasi rakyat dalam keputusan ekonomi: anggaran, tata ruang, perizinan, upah, lingkungan, teknologi, dan

layanan publik. Kapitalisme yang tidak dikendalikan demokrasi dapat berubah menjadi oligarki.

19. Kapitalisme dalam Konteks Negara Berkembang

Negara berkembang menghadapi problem khusus. Mereka membutuhkan pertumbuhan, industrialisasi, investasi, dan integrasi global. Tetapi mereka juga menghadapi kemiskinan, ketimpangan, kapasitas fiskal rendah, kelembagaan lemah, dan ketergantungan komoditas. Bila mereka membuka pasar terlalu cepat, industri domestik dapat kalah. Bila mereka menutup diri terlalu kuat, produktivitas dan inovasi terhambat. Bila negara terlalu lemah, pasar dikuasai elite. Bila negara terlalu dominan, rente meningkat.

Dalam negara berkembang, kesejahteraan memerlukan transformasi struktural. Pekerja harus bergerak dari sektor produktivitas rendah ke sektor produktivitas lebih tinggi. Pertanian harus naik produktivitas. Industri harus menghasilkan nilai tambah. UMKM harus naik kelas. Pendidikan dan kesehatan harus membaik. Infrastruktur harus menghubungkan wilayah. Negara harus mampu mengarahkan pembangunan tanpa ditangkap elite.

Indonesia, misalnya, menghadapi dilema ini: bagaimana menjaga pasar tetap terbuka tetapi tidak pasif; bagaimana memperkuat negara tetapi tidak birokratis; bagaimana mendorong investasi tetapi melindungi rakyat dan lingkungan; bagaimana melakukan hilirisasi tanpa menciptakan rente; bagaimana menggunakan AI tanpa memperlebar ketimpangan.

Kapitalisme di negara berkembang harus menjadi kapitalisme pembangunan yang inklusif, bukan kapitalisme ekstraktif.

20. Agenda Pembaruan Kapitalisme Kontemporer

Kapitalisme tidak harus ditolak sepenuhnya, tetapi harus diperbarui. Pembaruan kapitalisme berarti mengubah institusi agar pasar bekerja untuk kesejahteraan manusia.

Pertama, **pasar harus kompetitif**. Monopoli, oligopoli, dan dominasi platform harus diawasi. Persaingan sehat penting agar inovasi tidak berubah menjadi dominasi.

Kedua, **negara harus menyediakan layanan universal**. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air bersih, dan transportasi dasar harus diperlakukan sebagai fondasi kapabilitas.

Ketiga, **pajak harus adil**. Kekayaan, laba, aset, dan aktivitas digital harus dikenai pajak secara proporsional untuk membiayai kesejahteraan publik.

Keempat, **pekerjaan harus bermartabat**. Upah layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, hak berorganisasi, dan pelatihan ulang harus menjadi standar.

Kelima, **ekonomi digital harus diatur**. Data, AI, algoritma, dan platform perlu tata kelola yang melindungi warga dan persaingan.

Keenam, **transisi hijau harus adil**. Dekarbonisasi harus disertai perlindungan pekerja, kompensasi kelompok rentan, dan investasi energi bersih.

Ketujuh, **masyarakat harus diperkuat**. Koperasi, komunitas lokal, masyarakat adat, organisasi sipil, dan serikat pekerja harus menjadi bagian dari tata kelola ekonomi.

Kedelapan, **ukuran kesejahteraan harus diperluas**. PDB perlu dilengkapi dengan indikator kesehatan, pendidikan, ketimpangan, lingkungan, kualitas pekerjaan, dan kepercayaan sosial.

Kesembilan, **negara harus akuntabel**. Tanpa tata kelola bersih, negara kesejahteraan dapat berubah menjadi negara rente.

Kesepuluh, **demokrasi ekonomi harus diperluas**. Rakyat harus memiliki suara dalam kebijakan ekonomi yang memengaruhi hidup mereka.

21. Skenario Masa Depan Kapitalisme dan Kesejahteraan

Skenario 1: Kapitalisme Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam skenario terbaik, negara berhasil mengatur pasar tanpa mematikan inovasi. Pajak progresif membiayai layanan publik. AI dan digitalisasi dipakai untuk produktivitas rakyat. Koperasi dan UMKM naik kelas. Transisi hijau berjalan adil. Ketimpangan menurun dan kesejahteraan meningkat.

Skenario 2: Kapitalisme Stabil tetapi Timpang

Dalam skenario moderat, pertumbuhan tetap berlangsung, tetapi manfaatnya tidak merata. Negara menyediakan bantuan sosial minimum, pasar tetap dominan, dan masyarakat bertahan melalui solidaritas informal. Kelas menengah rentan, pekerja informal besar, dan ketimpangan tidak banyak berubah.

Skenario 3: Kapitalisme Oligarkis dan Krisis Sosial

Dalam skenario buruk, kekayaan semakin terkonsentrasi, negara ditangkap elite, pasar dikuasai platform dan korporasi besar, perlindungan sosial lemah, krisis iklim memburuk, dan masyarakat kehilangan kepercayaan. Pertumbuhan mungkin tetap ada, tetapi legitimasi sosial kapitalisme melemah.

22. Kesimpulan

Kapitalisme kontemporer adalah sistem yang sangat produktif, tetapi tidak otomatis menyejahterakan semua orang. Ia menciptakan inovasi, investasi, teknologi, dan pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan ketimpangan, kerentanan kerja, konsentrasi kekayaan, finansialisasi, komodifikasi layanan

dasar, dan krisis ekologis. Problem kesejahteraan bukan tanda bahwa pasar tidak berguna, tetapi tanda bahwa pasar tidak cukup.

Kesejahteraan membutuhkan relasi yang seimbang antara pasar, negara, dan masyarakat. Pasar diperlukan untuk inovasi dan efisiensi. Negara diperlukan untuk regulasi, redistribusi, barang publik, perlindungan sosial, dan arah pembangunan. Masyarakat diperlukan untuk solidaritas, etika, partisipasi, dan pengawasan demokratis. Bila ketiganya bekerja seimbang, kapitalisme dapat dijinakkan dan diarahkan menuju kesejahteraan. Bila salah satunya mendominasi secara tidak terkendali, kesejahteraan melemah.

Pertanyaan utama bukan apakah kapitalisme harus ada atau tidak, tetapi kapitalisme seperti apa yang ingin dibangun. Kapitalisme yang hanya mengejar laba akan memperdalam ketimpangan. Kapitalisme yang dikendalikan oligarki akan merusak demokrasi. Kapitalisme yang mengabaikan lingkungan akan menghancurkan basis kehidupan. Tetapi kapitalisme yang diatur secara demokratis, dibatasi oleh keadilan sosial, dan diarahkan pada kapabilitas manusia dapat menjadi sistem yang lebih manusiawi.

Akhirnya, kesejahteraan tidak boleh dipahami hanya sebagai hasil samping pertumbuhan. Kesejahteraan harus menjadi tujuan utama ekonomi. Ekonomi ada untuk manusia, bukan manusia untuk ekonomi. Pasar harus melayani kehidupan, negara harus melindungi martabat, dan masyarakat harus menjaga solidaritas. Itulah pembacaan utama atas kapitalisme kontemporer dan problem kesejahteraan.

Glossarium

Asimetri Informasi

Kondisi ketika satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lain, sehingga keputusan pasar menjadi tidak adil atau tidak efisien.

Barang Publik

Barang atau jasa yang manfaatnya luas, sulit mengecualikan orang dari penggunaannya, dan sering kurang disediakan pasar, seperti udara bersih, keamanan, pendidikan dasar, dan kesehatan publik.

Demokrasi Ekonomi

Prinsip bahwa rakyat memiliki akses dan suara dalam pengelolaan sumber daya, pasar, pekerjaan, teknologi, dan kebijakan ekonomi.

Eksternalitas

Dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak tercermin dalam harga pasar, misalnya polusi, emisi karbon, atau kerusakan lingkungan.

Finansialisasi

Meningkatnya dominasi sektor keuangan, aset finansial, utang, dan logika pemegang saham dalam ekonomi.

Kapabilitas

Kemampuan nyata manusia untuk menjalani hidup yang bernilai, seperti hidup sehat, belajar, bekerja layak, berpartisipasi, dan terlindungi dari risiko.

Kapitalisme Kontemporer

Bentuk kapitalisme masa kini yang ditandai oleh globalisasi, finansialisasi, digitalisasi, platform, AI, rantai pasok global, dan konsentrasi kekayaan.

Kapitalisme Platform

Sistem ekonomi digital ketika platform mengatur interaksi pasar, data, transaksi, reputasi, algoritma, dan akses ekonomi.

Kegagalan Pasar

Keadaan ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan hasil yang efisien, adil, atau berkelanjutan.

Kesejahteraan

Kondisi hidup yang mencakup pendapatan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, martabat, partisipasi, dan lingkungan yang sehat.

Koperasi

Organisasi ekonomi berbasis kepemilikan dan pengelolaan bersama oleh anggota untuk kepentingan bersama.

Market Power / Kekuatan Pasar

Kemampuan perusahaan atau kelompok perusahaan memengaruhi harga, upah, akses pasar, atau aturan transaksi karena posisi dominan.

Negara Efektif

Negara yang mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

Negara Kesejahteraan

Negara yang menyediakan perlindungan sosial, layanan publik, dan redistribusi untuk menjamin kesejahteraan dasar warga.

Oligarki

Kondisi ketika kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang mampu memengaruhi kebijakan publik.

Pajak Progresif

Sistem pajak ketika kelompok berpendapatan atau berkekayaan lebih tinggi membayar proporsi pajak lebih besar.

Pasar Kompetitif

Pasar yang memiliki persaingan sehat, akses relatif terbuka bagi pelaku baru, dan tidak dikuasai oleh monopoli atau oligopoli.

Perlindungan Sosial

Sistem kebijakan untuk melindungi warga dari risiko sakit, pengangguran, usia tua, kemiskinan, bencana, dan kerentanan sosial.

Transisi Hijau yang Adil

Perubahan menuju ekonomi rendah karbon yang disertai perlindungan bagi pekerja, daerah, dan kelompok rentan.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.
- Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. PublicAffairs.
- Bowles, S. (2012). *The new economics of inequality and redistribution*. Cambridge University Press.
- Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*, 3, 1–44. <https://doi.org/10.1086/466560>

Deaton, A. (2013). *The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality*. Princeton University Press.

Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.

Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368.
<https://doi.org/10.1111/gove.12035>

Goldin, C., & Katz, L. F. (2008). *The race between education and technology*. Harvard University Press.

International Labour Organization. (2024). *World Social Protection Report 2024–26: Universal social protection for climate action and a just transition*. ILO.

Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.

Mazzucato, M. (2013). *The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths*. Anthem Press.

Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

OECD. (2024). *Society at a glance 2024: OECD social indicators*. OECD Publishing.

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.

Piketty, T., & Saez, E. (2003). Income inequality in the United States, 1913–1998. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 1–39.
<https://doi.org/10.1162/00335530360535135>

Polanyi, K. (1944). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Farrar & Rinehart.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press.

Rodrik, D. (2014). Green industrial policy. *Oxford Review of Economic Policy*, 30(3), 469–491. <https://doi.org/10.1093/oxrep/gru025>

Rodrik, D. (2018). What do trade agreements really do? *Journal of Economic Perspectives*, 32(2), 73–90. <https://doi.org/10.1257/jep.32.2.73>

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (1989). Markets, market failures, and development. *American Economic Review*, 79(2), 197–203.

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.

Streeck, W. (2016). *How will capitalism end? Essays on a failing system*. Verso.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. World Bank.

World Inequality Lab. (2026). *World Inequality Report 2026*. World Inequality Lab.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 28 June 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7>